

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH – KABUPATEN PAMEKASAN
2024

PERDA KABUPATEN PAMEKASAN NO. 1, LD 2024 / NO. 1, TLD 24, 51 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965; UU No 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 4 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 16 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah. Pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah terdiri atas PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB. Jenis Retribusi terdiri atas: Retriusi Jasa Umum; Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan tertentu; Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum; Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas Pelayanan Jasa Umum.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Januari 2024
 - Pada saat Perda ini mulai berlaku maka : Perda Kab. Pamekasan No. 6 Tahun 2010; Perda Kab. Pamekasan No. 2 Tahun 2011; Perda Kab. Pamekasan No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Pamekasan No. 13 tahun 2012; Perda Kab. Pamekasan. No. 14 Tahun 2012; Perda Kab. Pamekasan No. 15 Tahun 2012; Perda Kab. Pamekasan No. 8 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Penjelasan : 17 HLM
Lampiran : 67 HLM